

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji dan menganalisis Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum belum efektif. 2) Untuk mengkaji dan menganalisis kelamahan-kelemahan Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum saat ini. 3) Untuk menemukan Rekonstruksi Peran dan Tanggungjawab Polisi Pamong Praja Pada Masa Yang Akan Datang Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Yang Berbasis nilai keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *socio legal approach*. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian non doktrinal. Dalam penelitian hukum non doktrinal ini realitas kehidupan itu tidaklah muncul secara empiris dalam alam amatan, dan menampak dalam wujud perilaku yang terpolo dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif), dan karenanya bisa diukur-ukur.

Hasil penelitian ini adalah 1) Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam di dalam menegakkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 belum efektif dikarenakan jumlah ketertiban masyarakat yang ditegakkan di dalam daftar kegiatan penegakkan Peraturan Daerah dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas belum semua jenis ketertiban dan jenis penyakit masyarakat, hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa laporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menegakkan Peraturan Daerah serta memberantas Penyakit Masyarakat belum memperlihatkan jenis-jenis ketertiban; 2) Kelemahan-kelemahan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu: a) Faktor kelemahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007; b) Faktor manajemen institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam; c) Faktor ekonomi; d) Faktor daya dukung masyarakat. 3) Rekonstruksi peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomer 16 Tahun 2007 yang berbasis keadilan terdiri dari: a) Pasal 255 ayat 1 UU No 32 Tahun 2014 berbunyi : satuan polisi pamong praja di bentuk untuk menegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) berupa melindungi hak berpikir dan berpendapat jaminan kehidupan yang lebih baik serta perlindungan hak milik. b) Pasal 1 ayat 1 Peraturan Daerah kota batam No 16 tahun 2007 berbunyi satuan Polisi Pamong Praja atau sebutan lainnya adalah perangkat daerah kota yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman serta fungsi pengamanan Peraturan Kepala Daerah di wilayah kota yang berkeadilan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. c) Pasal 26 ayat 1 Peraturan Daerah kota batam No 16 tahun 2007 berbunyi pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh satuan Polisi Pamong Praja secara mandiri yang berkeadilan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya.

**Kata Kunci : Rekonstruksi, Peraturan Daerah, Nilai Keadilan**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is 1) To study and analyze the Role and Responsibilities of the Civil Service Police in Enforcement of Batam City Regulation Number 16 of 2007 concerning Peace and Public Order has not been effective. 2) To assess and analyze the weaknesses and roles of the Civil Service Police Responsibility and Responsibility in Enforcing Batam City Regulation Number 16 of 2007 concerning Peace and Public Order at this time. 3) To find the Reconstruction of the Role and Responsibility of Civil Service Police in the Future in Enforcement of Batam City Regulation Number 16 Year 2007 concerning Peace and Public Order Based on the Value of Justice.*

*The method used is the socio legal approach. The type of legal research used is non-doctrinal research. In this non-doctrinal legal research the reality of life does not appear empirically in the realm of observation, and appears in the form of behavior that is patterned and objectively structured (let alone normative), and therefore can be measured.*

*The results of this study are 1) The role of the Batam City Civil Service Police Unit in enforcing Batam City Regulation Number 16 of 2007 has not been effective because the amount of public order that is enforced in the list of regional regulations and Community Disease Eradication activities as explained above is not all types order and types of community ills, this is indicated by the fact that the report of the activity of the Batam City Civil Service Police Unit in enforcing Regional Regulations and eradicating Community Diseases has not shown the types of order; 2) Weaknesses of the role of the Civil Service Police Unit in enforcing Regional Regulation Number 16 of 2007 due to several factors, namely: a) The weakness factor of Regional Regulation Number 16 of 2007; b) Management factors of Batam City Civil Service Police Unit; c) Economic factors; d) The carrying capacity of the community. 3) Reconstruction of the role of the Civil Service Police Unit in upholding Regional Regulation Number 16 of 2007 based on justice consists of: a) Article 255 paragraph 1 of Law No. 32 of 2014 reads: the civil service police unit is formed to enforce Regional Regulations (PERDA) and Regulations Regional Head (PERKADA) in the form of protecting the right to think and think a guarantee of a better life and protection of property rights. b) Article 1 paragraph 1 of Batam City Regional Regulation No. 16 of 2007 reads the Civil Service Police Unit or other designation is the regional apparatus of the city that carries out the function of order and peace and the security function of the Regional Head Regulations in equitable city areas led by a head in charge answer to the mayor through the regional secretary c) Article 26 paragraph 1 of the Batam City Regional Regulation No. 16 of 2007 reads the supervision of the implementation of the provisions in this regional regulation carried out by an independent Civil Service Police unit that is based on justice and coordinates with other law enforcement officers.*

**Keywords: Reconstruction, Regional Regulations, Value of Justice**